

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Pengertian Pengembangan Masyarakat pesisir

1. Pengertian Pengembangan

Pengembangan masyarakat adalah serangkaian upaya untuk mendorong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan swadaya.¹⁸

Pemberdayaan yang dimaksud sebelumnya adalah pendampingan, maka istilah tersebut dimengerti sebagai proses perubahan diri masyarakat secara partisipatif menuju kesejahteraan dan kemandirian dalam meningkatkan ekonominya. Sebagai tujuannya, yaitu untuk mengembangkan partisipasi masyarakat miskin; untuk memperkembangkan sikap, pengetahuan, ketrampilan berusaha agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya.¹⁹

Sedangkan Dunham mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai berbagai upaya yang terorganisasi yang dilakukan guna meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, terutama melalui usaha yang

¹⁸ Abu Hurairah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pengembangan yang Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2008), hal. 134

¹⁹ M. Nadhir, *Memberdayakan Orang Miskin Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat*, (Lamongan: YAPSEM, 2009), hal. 1

kooperatif dan mengembangkan kemandirian dari masyarakat pedesaan, tetapi hal tersebut dilakukan dengan bantuan teknis dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga sukarela.²⁰

Secara bertingkat, pengembangan masyarakat menurut Susilahardi yang dikutip dalam bukunya Abu Huraerah adalah sebagai berikut:²¹

- a. Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar.
- b. Tingkat keberdayaan kedua adalah, penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan.
- c. Tingkat keberdayaan ketiga adalah, dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri serta perekonomiannya.
- d. Tingkat keberdayaan keempat adalah, kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat pesisir yang lebih luas.
- e. Tingkat keberdayaan kelima adalah, kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Tingkat kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan.

Secara epistemologis, pengembangan berarti membina dan meningkatkan kualitas dan masyarakat islam berarti kumpulan manusia yang beragama Islam.²² Dalam pengertian lain, Amrullah Imang Mansur menyatakan bahwa pengembangan masyarakat Islam adalah sebagai upaya membangkitkan potensi ummat Islam ke arah yang lebih baik, baik dalam kehidupan politik maupun ekonomi.²³

Berdasarkan aspek geografis, masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir. Mereka menggantungkan kelangsungan hidupnya dari upaya mengelola sumber daya alam yang tersedia

²⁰ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat...*, hal. 219

²¹ Abu Huraerah, *Pengorganisasian & Pemberdayaan Masyarakat...*, hal. 90

²² Nani Machendrawati, *Pengembangan Masyarakat Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 29

²³ *Ibid*, hal. 42

di lingkungannya, yakni di kawasan pe sisir atau perairan laut. Secara umum, sumberdaya penangkap ikan di laut (tangkap dan budaya) merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakat pesisir.²⁴

Jadi masyarakat pesisir disini diartikan masyarakat yang tinggal dan hidup di wilayah pesisir. Wilayah pesisir adalah wilayah transisi, yang menandai tempat perpindahan antara wilayah daratan dan laut atau sebaliknya. Di wilayah ini, sebagian besar masyarakatnya hidup dari mengelola sumber daya pesisir dan laut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena dari perspektif matapencahariannya, masyarakat pesisir tersusun dari kelompok-kelompok masyarakat yang beragam, seperti nelayan, petambak, pedagang ikan, pemilik toko, serta pelaku industri kecil dan menengah pengolahan hasil tangkap.

Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Seperti halnya masyarakat Jumiang, mereka memanfaatkan potensi yang ada di wilayah tersebut dengan membudidayakan rumput laut.

Konsep pemberdayaan, menurut Gunawan Soemodiningrat dapat dilihat dari tiga sisi. *Pertama*, pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. *Kedua*, pemberdayaan untuk memperkuat potensi ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses

²⁴ Kusnadi, *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, hal. 3

terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. *Ketiga*, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat, dengan cara melindungi dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.²⁵

Sejalan dengan ini, Hikmat mengemukakan, bahwa pemberdayaan dapat diletakkan pada kekuasaan tingkat individu dan sosial. Pemberdayaan itu sendiri merupakan sebuah upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Ada dua elemen terpenting di dalam konsep pemberdayaan yaitu mempertemukan peranan pemerintah dan masyarakat secara egaliter. Masyarakat dengan potensi sosial (social capital)-nya serta pemerintah dengan kebijakannya, secara bersama-sama akan memberikan warna terhadap sumberdaya dan pengelolaannya. Hal inilah yang akan menjadi fokus terpenting di dalam penentuan konsep pemberdayaan.

Modal sosial masyarakat juga dapat memperkuat kapasitas organisasi yang mewadahi kegiatan ekonomi di dalam kerangka pemberdayaan sosial. Karena modal sosial disini sebagai bagian dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma dan jaringan yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat memfasilitasi tindakan terkoordinasi.²⁶

²⁵ Niken Dwi S, "*Model Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Desa Pantai Madura dan Kawasan Selatan Jawa Timur*, *Jurnal Libtang Jawa Timur*, Vol 3 No 1 (2004), hal. 85

²⁶ John Field, *Modal Sosial* (Bantul: Kreasi Wacana, 2010), hal. 6

Terkait dengan perilaku warga masyarakat di dalam dan antar kelompok, Ainyar mengemukakan tiga macam bentuk modal social, yaitu:

- 1) *Bonding capital* yang merupakan modal social yang mengikat anggota masyarakat dalam satu kelompok tertentu.
- 2) *Bridging capital* yang merupakan salah satu bentuk modal social yang menghubungkan warga masyarakat dari kelompok social yang berbeda, dan
- 3) *Linking capital* yang merupakan suatu ikatan antara kelompok warga masyarakat yang lemah dan kurang berdaya, dengan kelompok warga masyarakat yang lebih berdaya (*powerful people*), misalnya bank, polisi, dinas pertanian dan sebagainya.²⁷

Dalam konteks pengembangan masyarakat Islam, kepercayaan dalam masyarakat terhadap berbagai upaya pengembangan masyarakat menjadi modal dasar yang utama untuk diprioritaskan. Kepercayaan disini dapat merujuk pada kepercayaan masyarakat pada aparat pemerintah, penegak hukum maupun hukum itu sendiri, serta kepercayaan antara satu dengan yang lainnya.²⁸

Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, dalam kehidupan kelompok atau komunitas terdapat beberapa karakteristik yang penting, di antaranya adalah asas resiprositas dan ikatan lokalitas serta adanya kehidupan social yang terorganisasi. Dalam asas tersebut, komunitas terdapat jaringan interaksi dan realisasi social yang cukup kohesif, serta masing-masing warga mempunyai perasaan dan kesadaran sebagai bagian dari kehidupan bersama, sehingga mempunyai ikatan yang kuat terhadap komunitasnya. Unsur-unsur tersebut akan tumbuh

²⁷ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat...*, hal. 308

²⁸ *Ibid*, hal. 62

menjadi semacam energi sosial yang cukup kuat yang dapat mendorong berbagai tindakan bersama untuk meningkatkan kondisi kehidupan dalam kelompok. Dalam berbagai akhir-akhir ini, realitas juga disebut sebagai modal sosial atau capital sosial, yang mempunyai potensi yang tidak kalah dibandingkan dengan berbagai bentuk capital yang lain, seperti modal financial, sumber daya alam dan sumber daya manusia.²⁹

Sebagaimana firman Allah dalam QS.alMaidah ayat 2:³⁰

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya: “..... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Pemanfaatan modal sosial yaitu untuk mendorong aktivitas bersama guna meningkatkan kesejahteraan sosial ini agaknya cukup relevan dan aktual sesuai tuntutan perkembangan saat ini yang menuntut masyarakat dapat lebih mandiri dalam menjalankan proses pembangunan. Dalam implementasinya untuk mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan proses pembangunan tersebut dibutuhkan kapasitas masyarakat untuk melakukan pengelolaan pembangunan, dan hal itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan modal sosial pada tingkat komunitas.³¹

²⁹ Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 86

³⁰ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 14

³¹ *Ibid*, hal. 93

Di bukunya Samsul Huda, bahwa Caroline Bryant dan Louise G. White, menyatakan pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia guna untuk mempersiapkan masa depannya. Adapun pendekatannya terdapat beberapa implikasi yakni:

Pertama, pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok (*capacity*), *Kedua*, pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemetaan nilai dan kesejahteraan (*equity*), *Ketiga*, pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai kemampuan yang ada padanya, kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kewenangan untuk memilih dan kewenangan untuk memutuskan (*empowerment*), *Keempat*, pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*), dan *Kelima*, pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu pada Negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (*interdependence*).³²

Secara umum, kegiatan pengembangan masyarakat pesisir yang dilakukan oleh berbagai lembaga dan institusi dapat dibagi pada tiga pendekatan. *Pertama*, adalah pendekatan yang memandang masyarakat yang menjadi sasaran proses diffuse sebagai objek semata, mereka tanpa perlu diberi kesempatan untuk melakukan penilaian apakah ide dan benda teknologi yang diperkenalkan itu berguna bagi mereka atau tidak. Pendekatan *kedua*, adalah pendekatan yang dilakukan dengan memberikan rangsangan dan motivasi kepada masyarakat pesisir yang dijadikan sasaran, mereka diberikan peluang untuk memikirkan dan menemukan cara pemecahan yang terbaik dalam masalah yang mereka hadapi. Artinya masyarakat disini dijadikan subyek. Pendekatan *terakhir* adalah kombinasi dari kedua pendekatan di atas.

Pembangunan yang bertanggung jawab merupakan manifestasi dari suatu kebijakan nasional mengandung lima ciri pokok:³³

Pertama, proses pembangunan ini hendaklah mendorong pencapaian efisiensi unit-unit ekonomi melalui kaidah-kaidah persaingan yang sehat sehingga pelaku-pelaku ekonomi betul-betul memperoleh imbalan melalui prestasi dan produktifitas secara wajar.

³² M. Syamsul Huda, *Komunitas Urban Clean* (Yogyakarta: LSAS, 2006), hal. 16-17

³³ Sri Edi Swasono, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat Dalam Arus Globalisasi* (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 2002), hal. 219

Kedua, proses pembangunan ini hendaklah diiringi dengan suatu perangkat aturan main yang fair untuk semua pelaku ekonomi berdasarkan prinsip keadilan sosial.

Ketiga, proses pembangunan ini hendaklah menyediakan suatu perangkat *social safety net* bagi golongan penduduk yang papa dan secara alamiah tidak punya kemampuan untuk bekerja.

Keempat, proses pembangunan ini hendaklah secara tegas disertai dengan adanya penyebaran informasi yang terbuka dan luas kepada masyarakat mengenai pengeluaran pemerintah.

Kelima, proses pembangunan ini hendaklah secara serius melaksanakan upaya-upaya untuk mempertahankan dan memperluas basis sumber lingkungan hidup (*environmental resource base*) agar generasi-generasi rakyat yang akan datang dimungkinkan untuk kehidupan yang lebih baik.

Tujuan pemberdayaan ini, yaitu untuk menciptakan kondisi yang dapat mendorong kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan hak-hak ekonomi, social, dan politik dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Untuk itu, pemberdayaan masyarakat pesisir diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan otonomi mereka dalam mengelola potensi sumber daya pesisir secara optimal dan berkelanjutan sebagai jalan untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Dengan demikian, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat pesisir dapat dicapai.

2. Prinsip-Prinsip Pengembangan

Dalam Pemberdayaan terdapat beberapa prinsip diantaranya:³⁴

- a. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif, karenanya pekerja social dan masyarakat harus bekerja sama sebagai patner.

³⁴ Edi Suharto, *Mebangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, hal. 69

- b. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
- c. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
- d. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
- e. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
- f. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
- g. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
- h. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
- i. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
- j. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif; permasalahan selalu memiliki beragam solusi.

- k. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

3. Strategi dan Indikator Pengembangan

a. Strategi Pemberdayaan

Secara umum ada empat strategi pengembangan masyarakat, yaitu:³⁵

1) *The Growth Strategy*

Penerapan strategi pertumbuhan ini pada umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis, melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktifitas, pertanian, permodalan dana kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat.

2) *The Welfare Strategy*

Strategi kesejahteraan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Apabila tidak dibarengi dengan pembangunan kultur dan budaya mandiri dalam diri masyarakat maka yang akan terjadi sikap ketergantungan masyarakat pada pemerintah.

3) *The Responsitive Strategy*

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan.

4) *The Integrated or Holistic Strategy*

Untuk mengatasi dilema pengembangan masyarakat karena “kegagalan” ketiga strategi seperti telah dijelaskan di atas, maka konsep kombinasi dan unsur-unsur pokok etika strategi di atas menjadi alternative terbaik.

b. Indikator Pemberdayaan

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka dalam menyangkut kemampuan ekonomi,

³⁵ Moh. Ali Aziz dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradikma Aksi Metodologi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005) hal. 8-9

kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, kemampuan kultural dan politis.

Kusnadi menyatakan, bahwa ada beberapa indikator kualitatif yang menandai bahwa suatu masyarakat pesisir memiliki keberdayaan yaitu sebagai berikut:³⁶

- 1) Tercapainya kesejahteraan sosial-ekonomi: individu-individu, rumah tangga, dan masyarakat, yang ditandai dengan hal-hal berikut ini:
 - Kemandirian ekonomi berkembang dan orientasi kewirausahaan meningkat.
 - Nilai tabungan dan investasi bertambah.
 - Kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, optimal, dan berkelanjutan.
 - Kondisi kualitas SDM berkembang baik.
- 2) Kelembagaan ekonomi berfungsi optimal dan aktivitas ekonomi stabil-kontinuitas.
- 3) Kelembagaan sosial berfungsi dengan baik sebagai instrumen pembangunan lokal.
- 4) Berkembangnya kemampuan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi: informasi, kapital, pasar, dan teknologi.
- 5) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan di kawasan pesisir dan tumbuhnya

³⁶ Heri Purwanto, *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*, hal. 27-28

kesadaran kritis warga terhadap persoalan-persoalan pembangunan yang ada di kawasan pesisir.

- 6) Kawasan pesisir menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional yang dinamis, serta memiliki daya tarik investasi.

4. Model-Model Pengembangan Masyarakat

Dalam karya klasiknya Jack Rothman mengembangkan tiga model yang berguna dalam memahami konsepsi tentang pengembangan masyarakat.³⁷

a. Pengembangan Masyarakat Lokal

Pengembangan masyarakat local adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan social dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai system klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.

b. Perencanaan Sosial

Perencanaan social disini menunjuk pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah social tertentu seperti, kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk dan lain-lain. Perencanaan social lebih

³⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat...* hal. 42-44

berorientasi pada “tujuan tugas” (*task goal*). Sistem klien perencanaan social umumnya adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung atau kelompok rawan social ekonomi, seperti para lanjut usia, orang cacat, janda, yatim piatu dan lain-lain. Para rencana social disini dipandang sebagai ahli (*expert*) dalam melakukan penelitian, menganalisis masalah dan kebutuhan masyarakat serta dalam mengidentifikasi, melaksanakan dan mengevaluasi program-program pelayanan kemanusiaan.

c. Aksi Sosial

Tujuan dan sasaran utama aksi social adalah perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*), sumber (*distribution of resources*) dan pengambilan keputusan (*distribution of decision making*). Pendekatan aksi sosial ini didasari suatu pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang seringkali menjadi “korban” ketidakadilan struktur.

5. Konsep Ekonomi

Konsep ilmu ekonomi menurut Alfred Marsall dalam bukunya yang berjudul *Principles of Economics*, mengatakan bahwa kajian tentang manusia dalam kehidupannya sehari-hari, ia mempelajari perbuatan perorangan dan perbuatan bersama manusia yang paling erat

kaitannya dengan pencapaian dan pemanfaatan alat pemenuhan kebutuhan materiil bagi kesejahteraan.³⁸

Menurut Neil J. Smelser yang dikutip oleh Mubyarto, bahwa ekonomi adalah pengelolaan tentang bagaimana orang-orang dan masyarakat mengadakan pilihan, dengan atau tanpa uang untuk menggunakan sumber-sumber produksi yang langka dan memiliki berbagai alternatif penggunaan atau konsumsi masa sekarang atau masa depan diantara banyak orang dan kelompok dalam masyarakat.³⁹

Neo Klasik juga mengajukan pengertian lain tentang ekonomi, yaitu merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumberdaya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, untuk menyalurkannya baik saat ini maupun di masa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.

Definisi di atas mengandung arti bahwa segala perilaku manusia mengandung konsekuensi. Ia dituntut untuk memilih satu dari berbagai pilihan yang ia hadapi. Walaupun pada akhirnya pilihannya bukan yang terbaik bagi dirinya tetapi usaha untuk memilih merupakan bagian usaha yang harus dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, ekonomi ini dianggap mempengaruhi

³⁸ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila; Gagasan dan Kemungkinan* (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 6

³⁹ Mubyarto, *Ekonomi Keadilan Sosial* (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), hal. 30-31

sikap manusia untuk lebih memperhatikan kepentingan pribadi dari pada sesama.

Kebutuhan dalam ekonomi islam adalah terbatas. Sedangkan, yang tidak terbatas adalah keinginan, karena keinginan merupakan wujud pemenuhan manusia yang dipengaruhi dari faktor luar dirinya, misalnya pengaruh keluarga dan lingkungan.

Dalam ekonomi Islam sumber daya tidak terbatas, Allah menciptakan alam semesta bagi manusia tidak akan habis-habis, karena di alam semesta ada potensi kekayaan yang sepenuhnya belum tergali oleh manusia. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menggali kekayaan alam yang tidak ada batasnya, sehingga timbul sikap kreativitas dalam menemukan hal-hal baru guna memenuhi kebutuhan.⁴⁰ Allah memberikan rezeki diantara manusia dengan ukuran yang berbeda-beda tergantung usahanya orang tersebut.⁴¹

6. Prinsip Ekonomi

Busfi Efriyoon dalam Islam dan Ekonomi mengatakan bahwasanya terdapat kesamaan prinsip antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi Islam. Prinsip ekonomi kerakyatan adalah kekeluargaan, keadilan, pemerataan pendapatan, keseimbangan antara individu dengan masyarakat, dan kerjasama atau jaringan. Sedangkan dalam prinsip ekonomi Islam terdapat prinsip tauhid, halal dan *thayyib* (baik), kerelaan, tolong-menolong, manfaat, dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.⁴²

⁴⁰ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 10-12

⁴¹ *Ibid*, hal. 28

⁴² Bustanuddin Agus, *Islam dan Ekonomi Suatu tinjauan Sosiologi Agama*, (Padang: Andalas University Press, 2006), hal. 44

Dalam Fikih Muamalah Nasrun mengungkap prinsip ekonomi Islam adalah bahwa segala perbuatan manusia, termasuk dalam aktivitas berekonomi, haruslah dilakukan dalam rangka mengabdikan kepada Allah; untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, adil, jujur, saling tolong-menolong, tidak mempersulit, dan suka sama suka; tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan akhlak terpuji dan fungsi manusia sebagai *khalifatullah* di bumi; mendahulukan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi; kesamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia; mengharamkan segala yang keji, haram, manipulasi, penipuan, eksploitasi; menghalalkan segala yang baik

Jadi pengembangan ekonomi muslim adalah menjadikan perekonomian masyarakat Islam yang kondisinya lemah (tidak berdaya) menjadi ekonomi yang kuat sehingga bisa menghasilkan produksi yang dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti halnya masyarakat Jumiang sekarang, yang dulunya mereka sebagai nelayan tradisional yang miskin, sekarang menjadi pembudidaya rumput laut yang sangat handal, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kesehariannya dan juga bisa membiayai anaknya untuk sekolah.

B. Program dan Proses Pengembangan Masyarakat

1. Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Usaha Budidaya Rumput laut dilakukan secara individual oleh masing-masing nelayan tetapi difasilitasi dalam suatu kelembagaan dengan pertimbangan maka akan berpengaruh terhadap pembudidayaan sebagai berikut:

- a. Usaha rumput laut secara individual oleh masing-masing petani akan tidak efisien secara ekonomis dan merangsang persaingan tidak sehat antar petani
- b. *Bargaining position* petani rumput laut secara individual lemah karena berbagai keterbatasan seperti modal, teknologi, akses pemasaran. Petani rumput laut hanya menjadi *price taker* dan sering merugikan.
- c. Efisiensi biaya dan pemakaian tenaga kerja lebih mudah tercapai, karena kelompok mengkoordinir segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha.
- d. Pembinaan kepada petani rumput laut lebih mudah dilakukan dalam suatu kelompok dan *sangat tidak efisien dan merepotkan* jika dilakukan kepada petani-petani rumput laut secara individual.
- e. *Bargaining position* Kelompok Usaha Bersama (KUB) rumput laut lebih kuat dalam berhadapan lembaga atau institusi lain.
- f. Kelompok merupakan lembaga yang sangat demokratis “ *milik bersama, dikelola secara bersama-sama dan untuk kepentingan bersama*”.

Atas dasar itulah kemudian petani rumput laut di pesisir Jumiang membentuk Kelompok Usaha Bersama Mitra Bahari. KUB mitra bahari didirikan pada tahun 2007 berlokasi di wilayah pesisir Jumiang Desa Tanjung Kecamatan Pademawu. Pada awalnya kelompok beranggotakan 22 orang dengan memfokuskan usaha pada pengembangan budidaya rumput laut.

KUB mitra bahari merupakan usaha rumput laut yang sangat berhasil di Kabupaten Pamekasan semula masyarakat Jumiang bermatapencaharian bidang perikanan tangkap dengan pendapatan rendah. Keberhasilan KUB mitra bahari memelopori pengembangan budidaya rumput laut menjadi pendorong masyarakat untuk beralih ke budidaya rumput laut dan bergabung dalam keanggotaan KUB. Perkembangan anggota dan kepemilikan rakit rumput laut oleh anggota KUB mitra Bahari.

- **Visi Usaha**

Visi usaha dari **KUB "MITRA BAHARI"** adalah menjadi kelompok usaha yang professional dengan mengutamakan pelayanan dan meningkatkan potensi ummat di daerah pedesaan.

- **Misi Usaha**

Misi usaha dari **KUB "MITRA BAHARI"** adalah memenuhi segenap kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari masyarakat pedesaan.

Tujuan dari kelompok usaha budidaya rumput laut, adalah menjadi kelompok usaha jasa konveksi yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen akan jasa konveksi secara provisional dengan memanfaatkan potensi masyarakat sekitar.

STRUKTUR PENGURUS KUB MITRA BAHARI 2010-2011

Pembina	: KADIS KANLUT
Ketua	: M. Zabur
Sekretaris	: Hairus Sholihin
Bendahara	: Maskurdi
Humas	: M. Mastur
Kabid Permodalan	: M. Thohir
Kabid Saprodi	: Suropto
Kabid Produksi	: Abdul Fatah
Kabid Pemasaran	: Amirullah
Unit Usaha Budidaya	: Hasan Basri
Unit Usaha Pengolahan	: Siti Zubaidah
Unit Usaha Simpan Pinjam	: Mashudi

2. Proses Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Budidaya Rumput Laut

Dalam proses pengembangan ekonomi masyarakat melalui budidaya rumput laut, yaitu masyarakat mematuhi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada yang di selenggarakan oleh KUB Mitra Bahari.

Pengembangan usaha rumput laut di pesisir Jumiang oleh KUB Mitra Bahari dilakukan mencakup, penguatan kelembagaan dan pengembangan manajemen usaha.

a. Penguatan Kelembagaan

Upaya penguatan kelembagaan dilakukan melalui ;

- Peningkatan kesadaran, rasa memiliki dan keterikatan anggota terhadap kelompok
- Peningkatan kekompakan dan kerjasama antar anggota
- Pengelolaan administrasi kelompok
- Penguatan permodalan kelompok
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dasar-dasar organisasi bagi anggota

b. Pengembangan Manajemen Usaha

Upaya pengembangan manajemen usaha dilakukan dalam bidang produksi atau budidaya, pengolahan hasil dan pemasaran.

- Bidang Produksi atau Budidaya Rumput Laut

Pengembangan manajemen usaha bidang produksi bertujuan meningkatkan produktivitas dan mutu rumput laut anggota kelompok melalui kegiatan-kegiatan:

Adopsi Teknologi budidaya rumput laut mencakup teknik-teknik :

- pemilihan bibit, yaitu Bercabang banyak, rimbun dan runcing tidak terdapat bercak dan terkelupas, Warna spesifik (cerah),

Umur 25 – 30 hari, berat bibit yang ditanam disarankan antara 50 – 100 gram atau rumpun, Tidak terkena penyakit.

- Pengikatan bibit, pengikatan rumput biasanya dilalukan setiap hari pada waktu penanaman. Penalian ini dilakukan oleh ibu-ibu dan anak-anaknya.
- pembuatan ‘ancak’, pelampung dan “bandul”, pembuatan ancak atau bandul paling lama prosesnya 15 hari. Pembuatan ancak dan bandul ini dilakukan oleh anggota laki-laki.
- Pelepasan ancak ke laut lepas, setelah penalian sudah selesai maka rumput laut tersebut di pasang ke ancak (rakit) yang sudah disediakan.
- Pengendalian hama penyakit
- Pasca panen, yaitu apabila sudah genap 45 hari maka rumput laut yang di tanam boleh dipanen. Tetapi dalam pemanenan ini hanya dipanen separuh karena separuhnya lagi untuk dijadikan bibit.
- Cara pengepakan bibit untuk pendistribusian, kantong plastik atau karung disesuaikan dengan potongan – potongan bibit yang akan dibawa, bibit rumput laut dimasukkan ke dalam kantong plastic atau karung tanpa dipadatkan supaya bibit tidak rusak, kemudian diikat, bagian atas kantong/karung dilubangi untuk sirkulasi udara, kantong plastik atau karung dimasukkan ke dalam kotak karton, untuk jarak dekat dapat tidak

mempergunakan karton, hanya karung atau kantong plastik yang dilubangi, bibit harus tetap dalam keadaan lembab selama dalam perjalanan, tidak terkena air tawar atau hujan, tidak terkena minyak atau kotoran lainnya, jauh dari sumber panas seperti mesin kendaraan dan lainnya.

Pengelolaan kegiatan budidaya atau produksi rumput laut dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota kelompok baik dari kalangan tua-muda, laki-laki-perempuan. Berbeda dengan kegiatan usaha penangkapan ikan yang didominasi kalangan laki-laki, kegiatan budidaya rumput laut dikerjakan seluruh lapisan masyarakat anggota kelompok secara bersama-sama.

- Bidang Pengolahan Hasil

Pengembangan pengolahan hasil rumput laut bertujuan meningkatkan nilai tambah ekonomis (*value added*) dan mengurangi resiko kerugian (*minimum risk*) jika terjadi penurunan harga. Kegiatan yang dilakukan kelompok mencakup, Teknik pengawetan rumput laut dan Pembuatan produk-produk olahan rumput laut bernilai ekonomis tinggi seperti; pengolahan agar-agar rumput laut, pengolahan karaginan, pengolahan alginat, pembuatan dodol rumput laut, pembuatan manisan rumput laut, pembuatan jelly rumput laut, pembuatan selai rumput laut dan minuman es rumput laut.

Pengelolaan kegiatan pengolahan hasil rumput laut umumnya dilakukan kalangan wanita. Pengerjaannya dilakukan secara bersama-sama oleh anggota kelompok.

- Bidang Pemasaran

Kelompok Usaha Bersama atau KUB MITRA BAHARI telah menjalin kerjasama kemitraan untuk memasarkan hasil produksi rumput laut. Kerjasama yang dilakukan dengan pihak pabrikan yaitu: PT.HELMY KARAGENAN INDONESIA di Gresik (2009-sekarang), PT. MARINA SURABYA di Surabaya (2008). Untuk memasarkan hasil olahan rumput laut dilakukan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan bazaar, pameran yang diselenggarakan di Kabupaten Pamekasan. Pemasaran secara langsung dilakukan di daerah jumiang pada hari-hari libur. Untuk memasyarakat Produk rumput la ut.

Usaha budidaya rumput laut melalui kelompok MITRA BAHARI membawa perubahan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat jumiang. Keberhasilan tidak hanya secara ekonomis semata, tetapi juga membawa perubahan pada aspek sosial budaya masyarakat dan aspek ekologi.

C. Kajian Teori

Teori modal sosial dapat ditelusuri awal mulanya pada pikiran Pierre Bourdieu dan James Coleman yang menekankan kepada pentingnya ikatan sosial dan norma-norma kemasyarakatan serta efisiensi ekonomi dalam kehidupan bersama.⁴³

Dalam pemikirannya Pierre Bourdieu, mengatakan bahwa modal sosial adalah jumlah sumber budaya, actual atau maya, yang berkumpul pada seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik pengenalan dan pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan.⁴⁴ Sedangkan menurut James Coleman, modal sosial adalah sumber daya yang lahir dari kumpulan suatu ikatan sosial tertentu. Modal sosial ini tidak jarang dipandang sebagai suatu aspek yang melahirkan “kontrak sosial” dan norma yang berlaku bagi seluruh masyarakat.⁴⁵ Menurut Durkheim kontrak sosial pada dasarnya adalah suatu institusi sosial yang mengikat diantara individu-individu anggota masyarakat dalam hubungan satu dengan yang lain, aturan-aturan yang berada di luar kontrak inilah yang disebut kesadaran kolektif. Robert Putnam juga menerjemahkan kapital sosial dalam suatu bentuk asosiasi warga masyarakat secara sukarela yang pola hubungannya didasarkan atas norma-norma bersama dilandasi dengan kepercayaan diantara mereka yang saling berhubungan. Oleh karenanya, dapat dipahami sebagai suatu fenomena struktural dan kultural. Sumber capital sosial

⁴³ Nadhir Salahuddin, *Konsep Modal Sosial dan Relevansinya Bagi Pengembangan Masyarakat Islam; Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 12, No. 2, Oktober, 2005, hal. 55

⁴⁴ John Field, *Modal Sosial*, 23

⁴⁵ *Ibid*, hal. 49

ini dapat berwujud adanya saling percaya yang memungkinkan terciptanya kesepakatan diantara keragaman dan perbedaan dalam masyarakat.⁴⁶ Oleh karena itu, dalam membangun hubungan-hubungan sosial yang baik dengan masyarakat merupakan kunci utama bagi pelaksanaan program pemberdayaan.

D. Penelitian Terdahulu

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa judul penelitian ini menunjuk pada “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Budidaya Rumput Laut”. Dalam melakukan kajian kepustakaan penelitian telah ditemukan beberapa penelitian yang realita dan sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan ini. Penelitian tersebut yaitu:

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; Partisipasi dan Strategi PSKP Dalam Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Nelayan di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, oleh Moh. Imron Fauzi Fakultas Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Tahun 2007. Dari hasil penelitian ini ditemukan, bahwa partisipasi dan strategi PSKP dalam mengembangkan ekonomi Masyarakat pesisir di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, dengan cara berbagai macam bentuk partisipasi seperti PSKP membangun organisasi secara kolektif secara internal dan eksternal, meningkatkan permodalan kegiatan simpan pinjam dan meningkatkan keterampilan anggota atau masyarakat berbasis hasil produksi wilayah (hasil laut dan pertanian). Serta meningkatkan komunikasi koordinasi dengan penentu kebijakan dalam pembangunan. Relevansi PSKP dalam

⁴⁶ Nadhir Salahuddin, hal. 56

mengembangkan ekonomi masyarakat nelayan sangat relevan dengan konsep dakwah pengembangan masyarakat Islam karena merupakan suatu proses perencanaan perubahan social untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam.